

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 1992, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.1 PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik, cet. Ketiga*, Sinar grafika: Jakarta.
- B.F Sihombing, 2004, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta , Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya jilid 1 Hukum Tanah Indonesia Cetakan ke-12*, Djambatan, Jakarta.
- Catharina Dewi wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.

- Johanes Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cetakan ke-1
Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusumah Wijaya dan Dwitagama Dedi, 2011, *Mengenal Penelitian Tindakan
Kelas*, PT Indeks, Jakarta.
- Maria W. Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum
Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab-Bab tentang Hypotheek*, Cetakan Ke-IV,
Citra aditya Bakti, Bandung.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta.
- Sadu wasistiono dan Irwan Tahir, 2007, *Pengembangan Desa*, Fokusmedia,
Bandung
- Soedikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
_____, 2000, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian hukum*, UII Press, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*,
Prenadamedia Group, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu
Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*,
PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Urip Santoso , 2012, *Hukum Agraria dan Kajian Komprehensif* , Kencana
Prenadamedia Grup, Jakarta.
- _____, 2010, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*,
Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012, *Perpajakan*, Mitra Wacana Media,
Jakarta.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003, *Sosiologi Perdesaan*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Tesis

Hanny Tristi Perdani, “Kedudukan Hukum Pungutan Pologoro di dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Sleman”, *tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Sri Widyati Hasil, “ Kewajiban Membayar Uang Pologoro Sebagai Budaya Hukum Dalam Jual Beli Tanah (Kasus di Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”. *tesis*, Universitas Diponegoro, 2003.

Jurnal/Majalah

Arie S. Hutagalung, 2000, *Penerapan Lembaga Rechtsverweking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah*, Hukum dan Pembangunan no.4, Jakarta.

Selo Soemardjan. 1988. *Pemerintah Desa, Laporan Penelitian*, Balitbang Depdagri, tidak diterbitkan.

Internet

Artikel: “ Berapa Juta Tanah Yang Belum Bersertifikat? Ini Kata Menteri ATR” <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3823561/berapa-juta-bidang-tanah-belum-bersertifikat-ini-kata-menteri-atr> diakses tanggal 1 Maret 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang ,
<https://magelangkab.bps.go.id/statictable/2019/04/09/573/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-kabupaten-magelang-menurut-kecamatan-tahun-2017-2018.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB.

Pungli Sertifikat tanah di Borobudur Capai Rp.400 jt, Begini Kronologinya, <https://borobudurnews.com/pungli-sertifikat-tanah-di-borobudur-capai-rp-400-juta-begini-kronologinya/> diakses pada tanggal 6 November 2019 Pukul 11.00 WIB.

Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, <https://saberpungli.id/profil/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB.

Sumbangan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan> diakses pada tanggal 26 September Pukul 19.00 WIB

Standar Prosedur dan Operasi Layanan Pertanahan, [https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/controller/Item/action/Detail?itemName=Konversi, Pengakuan dan Penegasan](https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/controller/Item/action/Detail?itemName=Konversi,Pengakuan,danPenegasan) diakses pada tanggal 18 September pukul 20.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia,(KBBI), <https://kbbi.web.id/pungli> diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 19.00 WIB

“Delik Pungutan Liar Dalam Layanan Publik” disampaikan oleh Widyopramono dalam Workshop “Peran APIP dalam, Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik” yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017. <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/5a43f0ab1419357>. diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 Tentang Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa;

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.